Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	2

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Jakpro Bantah Pungutan Liar JUP

JAKARTA — Plt Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Legal, dan Kepatuhan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Yeni Widayanti membantah ada pungutan liar terhadap warga di Kawasan Pantai Mutiara yang dilakukan anak usahanya, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP). Menurutnya, ada kerja sama operasional yang memberikan kewenangan kepada JUP yang bergerak di bidang utilitas parkir dan *water treatment plant* untuk mengelola lahan di Kawasan Pantai Mutiara seluas 4.995 meter persegi. "Di atas lahan tersebut, JUP kemudian melakukan kerja sama dengan dua pihak, pertama dengan pengurus RW 016 pada tahun 2002, untuk lahan seluas 800 meter persegi yang dipergunakan sebagai lokasi kantor RW 016," kata Yeni dalam keterangannya, Rabu (21/12).

Kedua, kata dia, dilakukan dengan PT EPID Menara AsetCo (yang sebelumnya PT Indosat) pada 2019 untuk lahan seluas 100 meter persegi sebagai lokasi *tower* Base Transceiver Station (BTS) "Pada perjanjian tersebut juga tertera nominal dan jumlah kontribusi atau sewa yang menjadi kewajiban dari masing-masing penyewa tempat," tutur dia.

Terpisah, Ketua RW 016 di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Santoso Halim mengaku dicopot setelah lantang membicarakan pungli di wilayah-nya. Awalnya, kata dia, ada banyak warga yang mengeluhkan dugaan praktik pungli di berbagai fasilitas umum dan sosial di perumahan elite itu. "Fasum dan fasos di perumahan elite Pantai Mutiara kerap dijadikan bisnis oleh berbagai pihak, termasuk oleh pengembang dan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo, perseroan daerah milik Pemda DKI," kata Santoso. ■ zainur mahsir ramadhan **ed:** nur aini